

**ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN
PARTISIPASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA
BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH):
Studi Kasus Pada Sekolah Dasar di Provinsi Lampung**

(TESIS)

Oleh

Nurohmayni Putri

NPM 2121031040



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

**ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY,
PARTICIPATION IN BOS FUND MANAGEMENT
(SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE):
Case Study Of An Elementary School In Lampung Province**

**By
Nurohmayni Putri**

This research aims to examine the implementation of accountability, transparency, participation, and management of school operational assistance funds in the province of Lampung. The samples in this study were obtained using the probability random sampling method.

Based on the established criteria, a total of 1,656 respondents were selected as research samples, distributed across 413 primary schools in the province of Lampung.

The results of the study indicate that the management of school operational assistance funds in primary schools in the province of Lampung is quite effective in applying principles and regulations regarding accountability, transparency, and participation in the management of these funds, both from the village government's perspective and the community's perspective.

Keywords: Accountability, Transparency, Participation, Management of School Operational Assistance Funds.

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH): Studi Kasus Pada Sekolah Dasar di Provinsi Lampung

Oleh

Nurohmayni Putri

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *probability random sampling*.

Berdasarkan kriteria yang ada, diperoleh 1.656 responden yang menjadi sampel penelitian yang tersebar di 413 Sekolah Dasar di Provinsi Lampung.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah dasar yang ada di Provinsi Lampung sudah cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

**ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN
PARTISIPASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA
BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH):
Studi Kasus Pada Sekolah Dasar di Provinsi Lampung**

Oleh

Nurohmayni Putri

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI

Pada

**Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis

: **ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH): STUDI KASUS PADA SEKOLAH DASAR DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Nurohmayni Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2121031040**

Program Studi

: **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si. Akt.
NIP 19710802 199512 2 001

Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., C.A.
NIP 19730923 200501 1 001

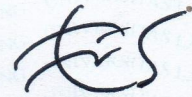
2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

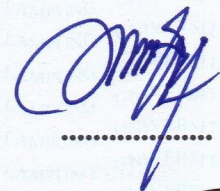
1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si. Akt.**



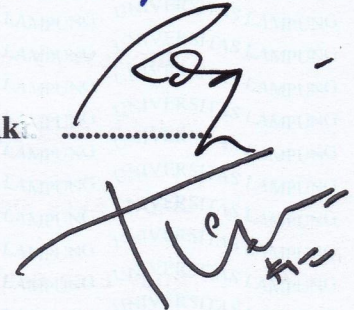
.....

Sekretaris : **Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., C.A.**



.....

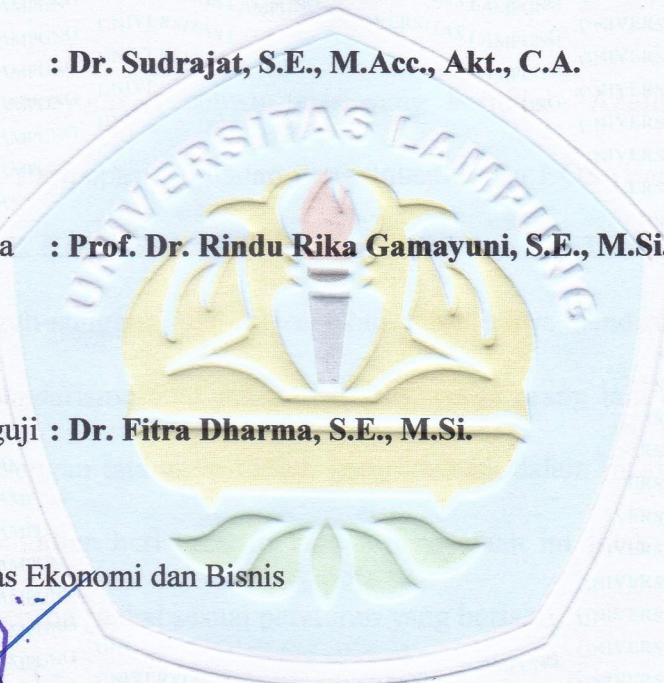
Penguji Utama : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**



.....

Anggota Penguji : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**

.....



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **30 Oktober 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurohmayni Putri NPM : 2121031040

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah: Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Di Provinsi Lampung” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023
Penulis,



Nurohmayni Putri
NPM. 2121031040

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Aji Jaya KNPI Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 01 Mei 1997 Merupakan putri kedua dari dua bersaudara, penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Ispriyanto S.Pd dan Ibu Siti Rohanah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Aji Jaya KNPI di Tulang Bawang pada tahun 2009, Kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Meraksa Aji di Tulang Bawang pada tahun 2012, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Swadhipa 1 Natar Lampung Selatan pada tahun 2015, Dan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Lampung pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2021. Penulis bercita-cita ingin melanjutkan karirnya menjadi Dosen.

MOTTO

**“MEMULAI DENGAN PENUH KEYAKINAN, MENJALANKAN
DENGAN PENUH KEIKHLASAN, DAN MENYELESAIKAN DENGAN
PENUH KEBAHAGIAAN”**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ispriyanto, S.Pd dan Ibunda Siti Rohanah yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.

Kakekku Kabul Suyono, Nenekku Sumiati dan Kakekku Slamet dan Nenekku Tuminah serta Abangku Zaenal Arifin, S.T., M.T. dan Kakak Iparku Dwi Winda Sari, S.T. atas keceriaan, motivasi, perhatian, dan dukungan kalian untukku selama ini.

Seluruh keluarga, sahabat, danteman-temanku yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tiada henti.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah): Studi Kasus pada Sekolah Dasar Di Provinsi Lampung”.

Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji Utama Penulis yang telah memberikan masukan, nasihat, saran-saran yang membangun serta diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan tesis ini.

5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan waktu, dukungan, arahan, dan masukan selama bimbingan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing kedua atas waktu, bimbingan, saran, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan selama proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas Kedua sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik atas waktu, bimbingan, motivasi, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Study Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan inspirasi yang berharga dalam penelitian, dan pembelajaran bagi penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas semua bantuannya.
11. Orang tuaku, bapak Ispriyanto dan Ibu Siti Rohanah. Terima kasih atas curahan cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti, untuk pengorbanan yang kalian berikan dalam merawat, membesarkan, dan mendidikku sampai saat ini. Kakakku Zaenal Arifin dan Dwi Winda Sari

Terima kasih atas keceriaan, motivasi, perhatian, dan dukungan kalian untukku selama ini.

12. Keluarga besarku tercinta yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu mendukung dan mendoakan agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Terima kasih atas doa, nasihat, dan motivasi yang kalian berikan untuk keberhasilan dan kesuksesanku.
13. Teman-teman kelas yang saya sayangi MIA angkatan 2021 terima kasih atas 2 tahun waktu kebersamaan kita, banyak pelajaran yang saya dapatkan selama bersama kalian.
14. Adik tingkat dan kakak tingkat. Terima kasih atas informasi perkuliahan, bantuan, kerja sama, dan dukungannya selama masa perkuliahan. Semoga sukses untuk kalian.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungannya bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 05 Desember 2023
Penulis,

Nurohmayni Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan	11
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i>	12
2.1.3 Pengelolaan Dana BOS	14
2.1.4 Akuntabilitas.....	16
2.1.5 Transparansi	20
2.1.6 Partisipasi	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Konseptual	26
2.4 Pengembangan Hipotesis	26
2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana BOS.....	27
2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana BOS	30
2.4.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana BOS	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
3.2 Metode Pengumpulan Data	38

3.3	Populasi dan Sampel	38
3.4	Variabel Penelitian	40
3.4.1	Variabel Terikat.....	40
3.4.2	Variabel Bebas.....	41
3.5	Definisi Operasional Variabel	41
3.6	Subjek Penelitian	44
3.7	Metode Analisis Data	44
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	45
3.7.2	Pengukuran Model.....	45
3.7.3	Struktur Model.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Populasi dan Sampel	47
4.2	Karakteristik Responden	49
4.3	Analisis Data	52
4.3.1	Penilaian Outer Model.....	52
4.3.2	Struktural Model.....	58
4.4	Uji Hipotesis.....	60
4.4.1	Pengaruh Langsung	61
4.5	Pembahasan Hasil Pengujian.....	62
4.5.1	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	62
4.5.2	Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	68
4.5.3	Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	71

BAB V PENUTUP.

5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Keterbatasan Penelitian	76
5.3	Saran	76
5.4	Implikasi.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Jumlah Sampel	40
Tabel 3.2 Variabel dan Alat Ukur	43
Tabel 3.3 Subjek Penelitian.....	44
Tabel 3.4 Uji Validitas	45
Tabel 4.1 Distribusi Data	47
Tabel 4.2 Perolehan Data Unit Analisis.....	48
Tabel 4.3 Karakter Responden.....	49
Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskriptif.....	51
Tabel 4.5 <i>Outer Loading</i>	54
Tabel 4.6 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	55
Tabel 4.7 <i>Nilai Fornell-Laker Criterion</i>	56
Tabel 4.8 Hasil Validitas Diskriminan Menggunakan <i>Cross Loading</i>	56
Tabel 4.9 <i>Composite Reability and Cronbach 's Alpha</i>	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Inner Model (R-Square)	59
Tabel 4.11 Skor Koefisien dan Jalur T-Statistic	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	26
Gambar 4.1 Estimasi Model Awal Penelitian	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban warganya. Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Terwujudnya tata kelola yang baik merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang berdayaguna, bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah Prinsip akuntabilitas.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong pemerintah dan pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu

pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dengan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat, maka pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Permasalahan yang terjadi dalam program dana BOS pada umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), karena masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat (Kaswandi, 2015). Untuk itu dana BOS perlu adanya evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS, agar dalam pengelolaan dana BOS apakah sudah sesuai dengan Juknis dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 dan tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dana BOS. Permasalahan Saat ini banyak yang belum mengetahui bagaimana pengelolaan BOS dimulai dari perencanaan, penggunaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Jadi artikel ini dibuat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan agar tidak adanya kekeliruan pada prakteknya nanti.

Bantuan Operasional Sekolah “BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar” (Kemendikbud, 2015). Jadi dapat dikatakan bahwa dana BOS adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau

pendanaan pendidikan non personalia kepada siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat memanfaatkan dana BOS tersebut.

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus program BOS bertujuan untuk;

- 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- 2) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta (Kemendikbud, 2015: 3).

Sasaran Program BOS dan Besar Bantuan Sasaran program dana BOS yaitu semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) (Kemendikbud, 2015).

Besarnya jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk. Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan (Kemendikbud, 2015) sebagai berikut:

- a) Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah.
- b) Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima.
- c) Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

Dalam konsep ini, negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kunci utama memahami tata kelola yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip tata kelola. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip tata kelola diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Akuntabilitas, Menurut Mardiasmo, pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
2. Transparansi, menurut Sukrisno & Ardana (2009) adalah sebagai berikut:
“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan

prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

3. Pengertian Partisipasi Menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) Pengertian partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sekolah Dasar yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap 2 tahun 2022 ada 1.879 Sekolah Dasar. Sementara di Provinsi Lampung pertanggal 20 Mei 2022 terdapat 271 Sekolah Dasar dari 4.729 Sekolah Dasar yang ada di Provinsi Lampung yang belum mengupload laporan rekapitulasi pembelanjaan BOS reguler tahap 2 tahun 2022 melalui website <https://bos.kemendikbud.go.id/>.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan bisa mengidentifikasi adanya manipulasi laporan keuangan (Hidayatullah dan Sulhani, 2018). Keterlambatan laporan keuangan bisa disebabkan karena proses pengkondisian laporan yang tidak mengikuti aturan teknis pengelolaan dana BOS. Setiap pengelolaan keuangan negara termasuk anggaran daerah harus dilakukan dengan tata cara yang telah diberlakukan. Hal ini berarti bahwa setiap instansi pemerintah yang menggunakan anggaran keuangan, termasuk pada instansi/ lembaga pendidikan

harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban secara akuntabel. Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menurut BPK (2009), Akuntabilitas anggaran publik setidaknya ditandai oleh dua hal yaitu bebas pemborosan dan bebas korupsi. Pemborosan anggaran publik selama ini sering muncul dalam berbagai bentuk antara lain: (i) pengeluaran pengeluaran negara yang berada pada tingkat yang tidak wajar; (ii) kegiatan kegiatan pejabat publik yang tidak bermanfaat bagi rakyat, seperti studi banding dan penelitian yang tidak jelas tujuannya; dan (iii) duplikasi kegiatan baik yang bersifat lintas program maupun lintas instansi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dewi (2010) menyimpulkan bahwa pengelolaan perencanaan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional sekolah) yang dimulai dari penyusunan RAPBS, kemudian perencanaan sumberdaya manusia pengelola dana BOS. Pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) disalurkan setiap triwulan. Besarnya dana BOS disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di SD Negeri 1

Patuk. Dan Evaluasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari pelaporan penggunaan dana BOS dalam bentuk pembuatan laporan penggunaan dana BOS yang terdiri dari RKAS/RAPBS (BOS K-1), buku kas umum (BOS K-3), buku pembantu kas tunai (BOS K-4), buku pembantu bank (BOS K-5), dan buku pembantu pajak (BOS K-6). Monika (2012) menyimpulkan bahwa, pengelolaan dana BOS di kedua sekolah yang ia teliti belum terlalu baik. Masih ada beberapa kesalahan, yang paling umum terjadi adalah kurangnya kelengkapan administrasi dalam bundel SPJ yang berisi bukti transaksi. Pengelolaan fasilitas sekolah yang terkait dana BOS SMPN 1 Purworejo pun masih dinilai kurang baik, dan di SMPN 11 Yogyakarta pengelolaan fasilitas secara keseluruhan tidak dapat diketahui dengan jelas. Dan untuk performa sekolah menurut Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, SMPN 1 Purworejo sudah melaksanakan pelaporannya dengan cukup baik. Begitu juga dengan SMPN 11 Yogyakarta pelaporan secara keseluruhan yang mereka buat sudah cukup baik.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Rizky (2015) menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang ia lakukan menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan perencanaan program BOS sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam juknis penggunaan BOS dari Kemendikbud. Sesuai dengan aturan program BOS yang menuntut transparansi, semua Sekolah sudah melakukan publikasi terkait program BOS dengan cara memasang spanduk bebas pungutan, mengumumkan rencana penggunaan dana BOS, laporan realisasi penggunaan dana BOS di setiap triwulan serta adanya informasi terkait kegiatan yang boleh dan tidak boleh menggunakan dana BOS. Perencanaan penggunaan dana BOS diawali dengan penyusunan RKAS, penyusunannya melibatkan kepala

sekolah, semua guru dan tenaga kependidikan lainnya serta komite sekolah. Peran komite sekolah lebih kepada pengembangan sarana prasarana sekolah dan menyetujui RKAS. Hambatan yang dirasakan sekolah dalam melaksanakan program BOS adalah tidak ada tenaga ahli khusus yang menangani administrasi BOS. Disarankan bagi komite sekolah agar berperan lebih aktif dalam penyusunan RKAS.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar yang ada di Provinsi Lampung, karena dalam penelitian terdahulu masih terdapat beberapa kesalahan dalam pengelolaan dana BOS terkait menyusun pembukuan dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar yang ada di Provinsi Lampung.

Maka berdasarkan fenomena yang ada, judul penelitian yang diambil adalah **“Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). (Studi Kasus pada Sekolah Dasar yang Ada Di Provinsi Lampung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar yang Ada Di Provinsi Lampung?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar yang Ada Di Provinsi Lampung?
3. Apakah peran partisipasi wali murid berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar yang Ada Di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar yang Ada Di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui transparansi informasi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar yang Ada Di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui partisipasi wali murid terhadap pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar yang Ada Di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang

Pengelolaan Dana BOS yang baik. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah Akuntansi serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi dinas Pendidikan di Provinsi Lampung, khususnya dalam pengelolaan dana BOS yang diterima. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dana BOS dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang baik.
3. Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi pengelolaan dana BOS pada instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan yang memberi wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Teori agensi berfokus pada biaya potensi konflik kepentingan antara pelaku dan agen, disebut sebagai *agency costs* (Pepper & Gore, 2014). Teori agensi berfokus pada masalah yang timbul di perusahaan sebagai akibat dari adanya pemisahan kekuasaan antara prinsipal dengan agen, dan menekankan pada solusi dari masalah tersebut. Teori agensi juga termasuk masalah keagenan yang terjadi ketika ada tujuan dan pembagian kerja yang berbeda antara pihak-pihak yang bekerja sama (Homayoun, 2015). Dengan demikian, teori agensi memberikan alasan yang kuat mengapa mempertahankan mekanisme kontrol diperlukan (Namazi, 2017).

Teori yang memberikan gambaran tentang hubungan antara pihak yang diberikan mandate dan pihak pemberi mandate. Seperti yang telah dijelaskan oleh Jansen & Meckling (1976). Dalam penelitian ini Menteri pendidikan dan kebudayaan bertindak sebagai principal, dan kepala sekolah sebagai agent yang terkait dalam kontrak yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan perihal Sekolah Penerima Dana BOS Reguler. Konflik kepentingan muncul diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara pembeli mandate (*principal*) dan yang menerima mandat (*agent*). Dari sisi *principal* ingin mendapatkan tujuan untuk kemajuan pendidikan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan melalui agent yaitu sekolah yang diwakilkan kepada kepala sekolah.

Kepala sekolah sebagai agent memiliki banyak informasi tentang kondisi sekolah dari pada principal karena memiliki peran sebagai penanggungjawab pengelola dana BOS. Oleh sebab itu adanya perbedaan informasi dipergunakan oleh kepala sekolah untuk membuat laporan penggunaan dana BOS yang tidak mengikuti petunjuk teknis. Hal ini dapat mengakibatkan buruknya kualitas laporan pengelolaan dana Bos yang disampaikan.

Berdasarkan teori agensi, pada saat sekolah berada dalam kondisi tidak baik maka pihak sekolah akan berusaha melakukan berbagai upaya untuk menutupinya. Diantaranya dengan memanipulasi laporan penggunaan dana BOS. Penyampaian informasi dalam laporan yang tidak sesuai dengan realita atau merupakan hasil manipulasi dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan yang dihasilkan dan menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Sistem *stewardship* (kepengurusan) telah ada sejak zaman abad pertengahan dimana seorang pelayan akan menjaga properti, binatang ternak, perkebunan dan melayani kebutuhan para kaum bangsawan (Donleavy, 2018). Kaum bangsawan adalah pemilik dan pelayan adalah agen. Namun karena masih menganut sistem

feodalisme maka belum ada kesadaran tentang kebutuhan biaya agen (*agency cost*). Ketika perdagangan dunia semakin terbuka dan ditinggalkannya sistem feodalisme serta menjamurnya entitas bisnis, maka peran steward berfokus pada mengamankan aset dan uang milik prinsipal. Secara kritis, steward yang baik terjadi ketika *steward* mampu mengamankan aset dan uang prinsipal dari pencurian, penggelapan, kekurangan dan perilaku mismanajemen.

Teori *stewardship* menekankan pada situasi dimana pimpinan atau manajer tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu tetapi menyelaraskan dengan tujuan organisasi (Davis, 1997). Teori *stewardship* menekankan pada perilaku kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* (Pasoloran & Rahman, 2001). Ketika kepentingan *principal* dan *steward* mengalami perbedaan maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentang. Pertimbangan utama *steward* untuk melakukan kerja sama dengan *principal* adalah bahwa keputusan untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau perilaku *principal* adalah karena bersifat rasional dengan pertimbangan untuk pencapaian tujuan organisasi atau entitas. Teori *stewardship* mengembangkan konsep kebersamaan (*collectivity*), kemitraan (*partnership*), pemberdayaan (*empowerment*), saling percaya (*trust*) dan pelayanan.

Penerapan teori *stewardship* untuk menganalisis pengelolaan dana BOS telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Pontoh, 2017), dan (Kasmini, 2017). Para peneliti meyakini bahwa manajemen sekolah tidak mengutamakan kepentingan individu mereka tetapi mengutamakan sasaran organisasi yang telah disepakati bersama. Penerapan teori *stewardship* dapat mendukung kinerja bendahara

sekolah yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Di sisi lain, penganggaran yang berkualitas dengan ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni disimpulkan dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan sekolah secara signifikan (Fauzan, 2020).

2.1.3 Pengelolaan Dana BOS

Dana BOS merupakan program pemerintah untuk membiayai kegiatan nonpersonalia sekolah untuk mewujudkan program wajib belajar (Ammar & Bustamam, 2019). Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia pada pasal 1 menjelaskan bahwa standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan selama 1 (satu) tahun periode yang bertujuan agar satuan pendidikan dapat berjalan dengan teratur dan berkelanjutan sesuai dengan aturan standar pendidikan nasional.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BOS tersebut diberikan kepada sekolah dalam bentuk dana. Dana BOS adalah dana Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah, yakni Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Tinjauan Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

1. Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perencanaan dana BOS diawali dengan pendanaan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan telah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas agar terpenuhi standar pendidikan nasional.
3. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008; 1) Biaya satuan pendidikan yang meliputi: Biaya investasi, Biaya operasional, Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa; 2) Biaya penyelenggaraan dan/pengelolaan pendidikan adalah Biaya penyelenggaraan dan/pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; 3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menurut peraturan pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan

pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bab VI tentang pelaporan pasal 9 ayat 1-2 yaitu : 1. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan, laporan kabupaten/kota, laporan propinsi dan laporan pusat. 2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah; 2) Pembukuan; 3) Realisasi penggunaan dana; 4) Rekapitulasi penggunaan dana BOS dan; 5) Penanganan pengaduan masyarakat.

Dimensi dan Indikator pengelolaan dana bantuan operasional sekolah menurut Yuliani Ismail (2019) adalah:

1. Perencanaan meliputi:
 - a. penyusunan RAPBS, RKS, RKAS
 - b. menyusun sumber dana BOS
2. Pelaksanaan meliputi:
 - a. penyaluran dana BOS
 - b. penggunaan dana BOS
3. Pengawasan meliputi:
 - a. pengawasan oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan
 - b. Kesesuaian penggunaan dana BOS
4. Pelaporan meliputi:
 - a. Rencana kegiatan
 - b. Pembukuan

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban bagi pihak pemegang amanah (*agent*) yang diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban, pengungkapan, penyajian serta pelaporan atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) sebagai pemangku kepentingan yang mempunyai hak serta wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Anggraini, 2015). Di dalam penelitian lain dijelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Aldona dan Trisnawati, 2018). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat (14) dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan tanggungjawabnya atas kesuksesan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dana APBN dan APBD menjadi bagian besar dalam sumber pendanaan sekolah sebagai dana bantuan untuk operasional sekolah dan dari pihak luar lainnya terutama orang tua siswa berupa sumbangan Pendidikan. Pihak sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan dana yang sudah diamanahkan oleh pihak luar tersebut (Rakhmawati, 2018).

Dari beberapa paparan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat di dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu sumber keuangan/ pendanaan pendidikan di sekolah.

Dalam buku petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, dikemukakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. Menurut (Waluyo, 2007) manajemen suatu organisasi harus “*accountabel*” untuk:

- a. Menentukan tujuan yang tepat.
- b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

Manfaat Akuntabilitas adalah upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi Waluyo (2007) dimaksudkan untuk:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- b. Mendorong terciptanya transparansi organisasi.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat.
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

Dimensi dan Indikator akuntabilitas menurut Yuliani Ismail (2019) adalah :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran meliputi :
 - a. Kepatuhan terhadap hukum
 - b. Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas Manajerial meliputi :
 - a. Peran yang jelas
 - b. Harapan dan kinerja yang jelas
 - c. Pelaporan kribel
3. Akuntabilitas Program meliputi :
 - a. Alternative program yang memberikan hasil yang optimal
 - b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakan
 - a. Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil
 - b. Mempertimbangkan dampak di masa depan

2.1.5 Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menurut Ratminto, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti (Asmani, 2012). Transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. disamping itu, transparansi dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi sebagai keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Susanti, 2019). Keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap informasi yang diberikan ke publik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya kepercayaan serta peningkatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tujuan dari transparansi adalah untuk menimbulkan rasa saling percaya antara pihak sekolah dan masyarakat melalui media informasi yang diberikan oleh pihak sekolah dengan menjamin kemudahan memperoleh informasi tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut maka diperlukan adanya upaya – upaya yang strategi

yang mampu dijalankan oleh pihak sekolah agar terciptanya transparansi publik. Didalam penelitian Rakhmawati (2018) adapun keberhasilan transparansi sekolah antara lain ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa.
- 2) Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.
- 3) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah.
- 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam penelitian Victoria (2015) indikator transparansi adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS.
- b. Kemudahan masyarakat mengakses informasi tentang pengelolaan dana BOS.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan keluhan masyarakat.
- d. Meningkatkan arus informasi.

2.1.6 Partisipasi

Partisipasi merupakan hak dan kewajiban bagi seseorang untuk berkontribusi dalam pencapaian suatu tujuan kelompok (Rakhmawati, 2018). Menurut Fauzan (2014) partisipasi diartikan sebagai proses dimana stakeholders (orang tua) terlibat secara aktif untuk berkontribusi, baik secara individual maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan sebuah keputusan,

perencanaan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan Pendidikan sekolah. Semakin tinggi tingkat derajat partisipasi menunjukkan semakin besar peran serta masyarakat dalam ikut serta dalam penentuan kebijakan. Dalam rangka memperkuat partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah (Rakhmawati, 2018):

- 1) Mengeluarkan informasi yang dapat diakses publik.
- 2) Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga dalam kegiatan publik.
- 3) Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan dan layanan publik.

Indikator partisipasi stakeholders dalam hal ini komite sekolah mengacu pada UU no 44 tahun 2002 tentang peran dewan pendidikan dan komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator antara pemerintah (*executif*) dan masyarakat di satuan pendidikan. Partisipasi juga mempunyai peran besar dalam mendinamisasi sekolah dari berbagai unsur, salah satunya adalah masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan Wali Murid. Partisipasi menurut Resbin L. Sihite adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu program atau kegiatan tertentu, sehingga bermakna dalam pencapaian tujuan. Sihite menambahkan, wujud dari partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran, tindakan, sumbangan dana atau barang yang berguna bagi program ataupun pencapaian tujuan. Sehingga, jika dikaitkan dengan penelitian ini, partisipasi merupakan keterlibatan dan peran serta dalam menyampaikan ide dan gagasan, mengambil keputusan, melaksanakan,

mengawasi, dan mengevaluasi dalam pengelolaan anggaran dana BOS. partisipasi dalam pengelolaan anggaran dana BOS dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan Wali Murid yang ikut serta dalam penyusunan rencana anggaran sekolah dalam program RKAS. Dengan keterlibatan masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan Wali Murid dapat memanfaatkannya untuk menyampaikan kritikan, masukan, dan lain-lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu untuk membantu penulis menyusun penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji, yaitu variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi (X3) terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Y). Penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ristya Dwi Anggraini (2013)	Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya	Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sedangkan partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Selain itu, akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan oleh karena itu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas saling berkaitan dalam menciptakan <i>good governance</i> .
2.	Sopian, Asqolani, Bagas Johantri	Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi, fungsi manajemen sekolah dan

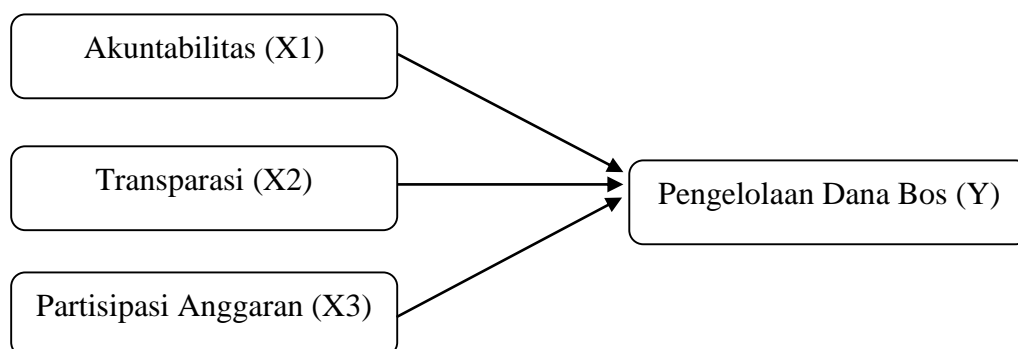
No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		Sekolah	teknologi informasi baik secara partial maupun secara simultan mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Hasil riset ini dapat dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk memperkuat kompetensi bendahara sekolah, meningkatkan partisipasi manajemen sekolah dan masyarakat serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel.
3.	Sri Rahayu, Unti Ludigdo, Gugus Irianto, Nurkholis	<i>Budgeting of School Operational Assistance Fund Based on The Value of Gotong Royong</i>	<i>This study aims to explore problems in budgeting process of school operational assistance (SOA) fund at public basic education institutions. Ethnometodology used as a research methods. The results showed that there is a lack of parents and community participation. Personnel cost is high while the accountability and Transparency are poor. To solve the problems, this study proposes gotong royong as a basic of SOA fund budgeting. Gotong royong will be more accepted by stakeholders of the school, because it is a basic culture in Indonesia.</i>
4.	Erdiani Silele (2017)	<i>School Operational Assistance Fund (BOS)</i>	Perencanaan dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 khususnya dalam penyusunan RKAS yang seharusnya disahkan oleh SKPD (Satuan kerja

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
5.	Irene Muryati (2016)	<i>Management Operational Assistance Fund (BOS)</i>	<p>perangkat daerah) Dinas pendidikan Kabupaten Halmahera Barat (Tim manajemen BOS kabupaten/kota). Seharusnya setelah disetujui oleh dewan guru dan memperhatikan pertimbangan komite sekolah maka selanjutnya disahkan oleh SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pengelolaan dana BOS diprioritaskan untuk peningkatan mutu, namun partisipasi warga sekolah kurang optimal. (2) Pada pelaksanaan: (a) penyaluran dana dilaksanakan di awal triwulan, (b) proses pembukuan dilaksanakan secara rutin, dan (c) prinsip akuntabilitas dan keterbukaan telah dilaksanakan dengan baik. (3) pengawasan dilakukankan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan memeriksa SPJ BOS; evaluasi dilakukan dengan mengisi angket pelaksanaan sekali dalam setahun oleh TIM Manajemen BOS Kabupaten. (4) Pelaporan penggunaan dana BOS dalam bentuk SPJ dilaksanakan setiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten melalui UPT Pelayanan Pendidikan.</p>
6.	Jansen and Malking (1976)	<i>Agency Costs and Ownership Structure</i>	Mengintegrasikan unsur-unsur dari teori agensi, teori hak milik dan teori keuangan untuk mengembangkan teori struktur kepemilikan perusahaan.

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
7.	Romana Noviyanti (2018)	<i>School Operational Assistance Fund (BOS) and Fund Management</i>	<i>The result of the study showed that most of the management of BOS fund was in accordance, proven that (1) in the management of BOS using school appropriate. (2) the use of BOS funds has been carried out appropriate. (3) the process of managing school finance is appropriate, stated in the RAPBS.</i>

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Pemikiran Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus pada Sekolah Dasar yang Ada Di Provinsi Lampung) dapat digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya Kerlinger (2006). Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan

merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan dengan cara penyelidikan ilmiah Yusuf (2005).

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS dapat dilihat melalui beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana BOS, yaitu sebagai berikut : Proses Pembuatan Keputusan Dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan Dana BOS, harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar. Keputusan yang dibuat harus secara tertulis dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. Dalam prose pembuatan keputusan tersebut salah satu yang harus dipahami adalah kegunaan dana BOS, yaitu untuk :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.

- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKS/ MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.
- n. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/ satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta

tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Susanti, 2019). Demikian halnya dengan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, maka dalam proses pelaksanaannya perlu adanya akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas, maka akan diketahui apakah kinerja sekolah dapat diterima atau tidak oleh stakeholder. Sehingga jika akuntabilitas tinggi maka efektivitas pengelolaan dana BOS juga tinggi, namun sebaliknya jika akuntabilitas rendah, maka efektivitas pengelolaan dana BOS juga ikut rendah.

Hal ini didasari oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa, akuntabilitas menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan yang memberi wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan perusahaan sehingga menjadi ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif dan akuntabilitas (Rachmi, 2017). Beberapa studi empiris yang telah menemukan pengaruh positif antara akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS Anggraini (2015), Rachmi (2017), Trisnawati (2018), Fauzan (2014), dan Rakhmawati I (2018). Ammar, Faisyal & Bustamam (2019) melakukan penelitian pada SMP Negeri 3 Banda Aceh dan SMP Islam YPUI Darul Ulum Banda Aceh, dalam hasil mereka juga menemukan pengaruh positif antara akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Bos pada Sekolah Dasar Di Provinsi Lampung.

2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana BOS

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas, 2003). Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (Bappenas, 2003).

Transparansi pengelolaan dana BOS tidak hanya melibatkan unsur kepala sekolah, bendahara, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Transparansi pengelolaan dana BOS mengharuskan komponen sekolah (kepala sekolah, bendahara dana BOS, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite) terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana BOS. Dengan demikian perspektif lama masyarakat yang memandang sekolah adalah urusan dan tanggungjawab kepala sekolah, pendidik serta tenaga kependidikan harus ditiadakan.

Opini wajar tanpa pengecualian terhadap dana BOS di sekolah adalah opini bersama dalam pengelolaan dana BOS yang baik. Pertanggungjawaban dana BOS dapat diterima manakala penggunaan dana BOS dilakukan secara tepat, sesuai perencanaan, tanpa manipulasi, dan sepengetahuan setiap unsur sekolah.

Transparansi adalah mempertanggungjawabkan yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan, dan secara terbuka memberikan laporan pada organisasi independen seperti legislator, auditor, publik dan kemudian dipublikasikan Indikator-indikator transparansi yakni pemberian informasi jelas, kemudahan akses, penyusunan mekanisme pengaduan jika ada yang dilanggar. Selain itu adapula prinsip transparansi yaitu adanya informasi yang mudah di akses misalnya seperti dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Adapun manfaat transparansi yakni mencegah penyelewengan dana, meningkatkan akuntabilitas agar masyarakat dapat mengukur kinerja suatu lembaga dengan lebih baik serta meningkatkan kohesi sosial.

Partisipasi merupakan pembuatan keputusan yang melibatkan suatu kelompok atau masyarakat dalam bentuk penyampaian pendapat maupun penyampaian saran, keterampilan. Adapun macam partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung Menurut buku petunjuk teknis dana BOS (2012) dana BOS merupakan program pemerintah yang digunakan untuk menyediakan dana atau biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar RKAS merupakan dokumen perencanaan program pengembangan sekolah 1 (satu) tahun ke depan yang diharapkan untuk pencapaian SNP Melalui program

RKAS berupa rencana biaya dan pendanaan yang rinci, transparansi informasi juga merupakan faktor indikator kunci dalam pengelolaan dana BOS. Sekolah harus berupaya mencapai akuntabilitas, transparansi karena hal tersebut merupakan landasan dari proses penyusunan RKAS yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat yakni komite sekolah yang merupakan jembatan antara sekolah dan wali siswa. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang ditulis oleh Ekowati (2016) yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS”. Pada penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penambahan variabel partisipasi.

Hasil penelitian Ammar dan Bustamam (2019), Anggraini (2015), Susanti (2019), dan Rakhmawati I (2018) menemukan pengaruh positif antara transparansi dan pengelolaan dana BOS. Rachmi (2017) melakukan penelitian pada 30 Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cianjur. Pada penelitian mereka menemukan pengaruh positif antara transparansi dan pengelolaan dana BOS. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui hipotesisnya adalah:

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Di Provinsi Lampung.

2.4.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana BOS

Menurut Baedhowi & Dharma (2010) Partisipasi adalah proses dimana stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau

pengevaluasian pendidikan sekolah. Diharapkan, partisipasi dapat mendorong warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pengevaluasian yang menyangkut kepentingan sekolah, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung.

Pergeseran fokus kebijakan dari pemerintah pusat dan dari dinas pendidikan ke sekolah diharapkan proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengevaluasian pendidikan lebih partisipatif dan benar-benar mengabdikan kepada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan elite birokrasi dan politik. Dengan partisipasi aktif diharapkan mampu menjadikan aspirasi stakeholders sebagai panglima karena dengan MBS diharapkan mampu mengalirkan kekuasaan dari pemerintah pusat dan dinas pendidikan ke tangan para pengelola sekolah, yang sebenarnya sangat strategis karena pada level inilah keputusan dapat memperbaiki mutu pendidikan.

Definisi partisipasi (Nurcholidah dan Petrus, 2009) adalah kesadaran dan kepedulian orang tua murid dalam melakukan aktivitas-aktivitas turut serta mengambil keputusan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan dalam suatu program pendidikan di sekolah secara proporsional dilandasi kesepakatan. Definisi partisipasi masyarakat yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan

mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat (Lusiana, 2008), menyatakan hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar rasa memiliki; semakin besar rasa memiliki, semakin besar pula rasa tanggung jawab, dan semakin besar rasa tanggungjawab, semakin besar pula tingkat dedikasinya.

Menurut Baedhowi (2010) peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah.

Sehingga makin besar tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa bertanggungjawab; dan semakin besar rasa bertanggungjawab, semakin besar pula dedikasinya.

Tujuan Partisipasi Stakeholders Tujuan utama peningkatan partisipasi menurut Menurut Baedhowi & Surya Dharma (2010) adalah untuk:

1. Meningkatkan dedikasi/kontribusi stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa (pemikiran/ intelektualitas, keterampilan), moral, finansial dan material/barang.
2. Memberdayakan kemampuan yang ada pada stakeholders bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai advisor, supporter, mediator, controller, resource linker, and education provider.
4. Menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi stakeholders dan menjadikan aspirasi stakeholders sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Indikator Partisipasi Stakeholders Menurut Baedhowi & Surya Dharma (2010) mengatakan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan partisipasi stakeholders adalah sebagai berikut:

1. Membuat peraturan dan pedoman sekolah yang dapat menjamin hak stakeholders untuk menyampaikan pendapat dalam segala proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah.
2. Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi agar stakeholders dapat mengutarakan pendapatnya atau dapat mengekspresikan keinginan dan aspirasinya melalui pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, penyampaian pendapat secara tertulis, partisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah.

3. Melakukan advokasi, publikasi, komunikasi dan transparansi kepada stakeholders.
4. Melibatkan stakeholders secara proporsional dengan mempertimbangkan relevansi pelibatannya, batas-batas yurisdiksinya, kompetensinya, dan kompatibilitas tujuan akan dicapainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2018) dengan partisipasi sebagai variabel pemoderasi menemukan interaksi antara akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana BOS, tetapi interaksi antara transparansi dan partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Sedangkan hasil studi empiris yang menemukan pengaruh positif antara partisipasi dan pengelolaan dana BOS adalah Susanti (2019), Anggraini (2015), dan Frederik (2019). Di dalam penelitian Frederik (2019) pada SD, SMP dan SMA di Kota Manado dengan sampel sebanyak 45 responden, mereka menemukan pengaruh signifikan dan memiliki arah positif antara partisipasi dan pengelolaan dana BOS. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Partisipasi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Di Provinsi Lampung.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Menurut Sekaran & Bougie (2013) Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti terkait variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Data primer diperoleh melalui skor dari masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf kurikulum, staf humas, staf sarana prasarana, staf kesiswaan, bendahara, kepala tata usaha, komite sekolah dan wali murid pada Sekolah Dasar Di Provinsi Lampung.

Pengujian dilakukan dengan mengukur indikator-indikator variabel yang dikonversi menjadi angka, menganalisis data sesuai aturan statistika serta melakukan pengujian hipotesis. Pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) digunakan untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung antara variabel. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data primer adalah aplikasi *SmartPLS* versi 3.0.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan *Microsoft Forms* dan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pernyataan tertulis. Kuesioner langsung diantarkan ke lokasi penelitian dan diberikan kepada responden. Kuesioner yang disebar berupa daftar pernyataan tertulis kepada responden mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Jawaban responden akan diukur dengan menggunakan skala likert yaitu pilihan jawaban responden akan diberi nilai dengan skala 5 poin sebagai skor tertinggi dan skala 1 untuk skor terendah dengan memberi tanda cek (√) atau tanda silang (×) pada kolom yang dipilih. Adapun kriteria penentuan skor untuk masing-masing item pernyataan adalah sebagai berikut:

1	Sangat tidak setuju	(STS)
2	Tidak setuju	(TS)
3	Netral	(N)
4	Setuju	(S)
5	Sangat setuju	(SS)

3.3 Populasi dan Sampel

Sekaran & Bougie (2013) menyatakan “populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistic sampel)”. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi pada penelitian ini adalah Sekolah Dasar yang ada di Provinsi Lampung.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Probability Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau bilangan acak. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan kabupaten/kota yang akan dijadikan sampel untuk menghitung banyaknya sampel minimum suatu survey populasi terbatas (*finite population survey*) tujuannya untuk mengestimasi proporsi populasi.

Rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang akan diteliti.

$$n = \frac{N}{(1+(Nxe^2))}$$

Dimana :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e : (5%) Presentase Kesalahan

Maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah :

$$= \frac{4.729}{(1+(4.729 \times 0,0025))}$$

$$= 369 \text{ Sampel}$$

Jumlah populasi sekolah sebanyak 4.729 sekolah, dengan asumsi kelonggaran kesalahan sebesar 5% maka minimal sampel yang diperlukan adalah sebanyak 369 sekolah.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel

No	Wilayah	Jumlah	Jumlah Sampel yang Diambil
1	Kab. Lampung Tengah	753	59
2	Kab. Lampung Timur	578	45
3	Kab. Lampung Selatan	502	39
4	Kota Bandar Lampung	241	19
5	Kab. Tanggamus	404	31
6	Kab. Lampung Utara	431	33
7	Kab. Way Kanan	316	25
8	Kab. Pesawaran	299	23
9	Kab. Tulang Bawang	220	17
10	Kab. Pringsewu	265	21
11	Kab. Lampung Barat	216	17
12	Kab. Tulang Bawang Barat	176	14
13	Kab. Mesuji	135	11
14	Kab. Pesisir Barat	128	10
15	Kota Metro	65	5
Total	Total	4.729	369

3.4 Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu sebutan yang bentuknya dapat diberi nilai angka (kuantitatif) atau nilai mutu (kualitatif). Variabel dari suatu penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis (kesimpulan atau dugaan sementara). Artinya menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris yang ada di dalam dunia nyata. Ada empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan dana BOS, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.

3.4.1 Variabel Terikat

Variabel terikat atau variabel dependent diartikan sebagai variabel yang di pengaruhi, akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasa dinotasikan dengan Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Bos (Y).

3.4.2 Variabel Bebas

Variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang mempengaruhi, atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen (terikat). Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Variabel yang mempengaruhi baik secara negatif maupun positif terhadap variabel terikat disebut variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel yang mempengaruhi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Pengukuran Variabel menggunakan dimensi yang dikembangkan oleh peneliti peneliti sebelumnya dan sudah disesuaikan dengan obyek penelitian. Sebelum kuesioner disebar ke populasi maka akan dilakukan uji coba kuesioner. Berikut adalah definisi operasional variabel dan pengukurannya:

3.5.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah (*agent*) yang dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi Amanah (*principal*) yang mempunyai hak serta wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Rachmi, 2017).

3.5.2 Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan terhadap segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi adalah kondisi bahwa setiap orang yang mempunyai kepentingan terhadap Pendidikan dapat memahami proses dan hasil pengambilan keputusan serta kebijakan sekolah (Susanti, 2019).

3.5.3 Partisipasi

Menurut Fauzan (2014) partisipasi didefinisikan sebagai proses dimana para pemangku kepentingan (warga sekolah dan masyarakat) dapat berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pendidikan sekolah.

3.5.4 Pengelolaan Dana BOS

Keberhasilan dari suatu pengelolaan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu pengelolaan anggaran dalam hal ini adalah anggaran dana BOS, yaitu seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan penerapan prinsip good governance lainnya. Jika faktor-faktor tersebut dapat diatasi dengan baik maka akan mendorong pengelolaan dana BOS yang baik juga.

Pengelolaan dana BOS merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan rencana wajib belajar Sembilan tahun dari segi biaya Pendidikan. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS menganut dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga program dana BOS dapat berjalan secara efektif dan efisien (Ammar & Bustamam, 2019).

Tabel 3.2 Variabel dan Alat Ukur

No	Variabel/ Referensi	Dimensi	Indikator	No Kuesioner	Pengujian
1	Akuntabilitas (X1) Yuliani Ismail 2019	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	a. Kepatuhan terhadap hukum	1	Likert 1-5
			b. Penghindaran korupsi dan kolusi	2	
		Akuntabilitas Manajerial	c. Peran yang jelas	3	
			d. Harapan dan kinerja yang jelas	4	
			e. Pelaporan kribel	5	
		Akuntabilitas Program	f. Alternative program yang memberikan hasil yang optimal	6	
			g. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.	7	
		Akuntabilitas Kebijakan	h. Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil	8	
			i. Mempertimbangkan dampak di masa depan	9	
2	Transparansi (X2) Victoria (2015)		a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS.	1&2	Likert 1-5
			b. Kemudahan masyarakat mengakses informasi tentang pengelolaan dana BOS.	3&4	
			c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan keluhan masyarakat.	5&6	
			d. Meningkatkan arus informasi	7&8	
3	Partisipasi (X3) UU no 44 tahun 2002		a. pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>).	1	Likert 1-5
			b. pendukung (<i>supporting agency</i>).	2&3	
			c. pengontrol (<i>controlling agency</i>).	4&5	
			d. mediator antara pemerintah (<i>executif</i>) dan masyarakat di satuan pendidikan.	6	

No	Variabel/ Referensi	Dimensi	Indikator	No Kuesioner	Pengujian
4	Pengelolaan Dana Bos (Y) Pendawati damanik (2018)	Perencanaan	a. penyusunan RAPBS, RKS, RKAS	1	Likert 1-5
			b. menyusun sumber dana BOS	2	
		Pelaksanaan	c. penyaluran dana BOS	3	
			d. penggunaan dana BOS	4	
		Pengawasan	e. pengawasan oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan	5	
			f. Kesesuaian penggunaan dana BOS	6	
		Pelaporan	g. Rencana kegiatan	7	
			h. Pembukuan	8	

3.6 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat.

Responden terkait pengelolaan Dana BOS.

Tabel 3.3 Subjek Penelitian

No	Responden
1	Kepala Sekolah
2	Wakil Kepala Sekolah
3	Staf Kurikulum
4	Staf Humas
5	Staf Sarana Prasarana
6	Staf Kesiswaan
7	Bendahara
8	Kepala Tata Usaha
9	Komite Sekolah
10	Wali Murid

3.7 Metode Analisis Data

Kesimpulan ditarik dari hasil proses pengujian dan analisis data. Proses pengolahan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan variabel yang diteliti. *Metode Structural Equation Model (SEM)* digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan program *Partial Least Squares (PLS)* versi 3.0. Metode analisis yang digunakan antara lain :

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini, alat analisa yang digunakan adalah minimum, maksimum, median, mean, dan standar deviasi (Sugiyono, 2007).

3.7.2 Pengukuran Model

Pengukuran merupakan pemberian angka-angka atau simbol objek berdasarkan sekumpulan aturan yang telah ditentukan sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2013). Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan, kecermatan serta konsistensi alat ukur penelitian, sehingga tidak menimbulkan bias.

3.7.2.1 Uji Validitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat keandalan atau suatu keabsahan suatu ukuran, valid atau tidak pernyataan di dalam kuesioner mewakili variabel yang akan diuji maka lakukan uji validitas. Ada dua jenis pengujian yang digunakan yaitu *validitas convergent* dan *discriminant*. Data dinyatakan valid jika memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.4 Uji Validitas

Validitas	Parameter	Kriteria Penilaian
Validitas <i>Convergent</i>	<i>Loading Factor</i>	a. >0,70 untuk <i>confirmatory research</i> . b. 0,50-0,60 untuk penelitian tahap awal pengembangan skala dianggap cukup.
	AVE (<i>Average Variance Extracted</i>)	>0,50 untuk <i>confirmatory</i> dan <i>exploratory research</i> .
Validitas <i>Discriminant</i>	<i>Cross Loading</i>	Diharapkan setiap blok <i>indicator</i> memiliki <i>loading</i> lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan <i>indicator</i> untuk laten variabel lainnya.
	Akar AVE dan korelasi antar konstruk laten	Akar AVE > korelasi antar variabel laten.

Sumber: Data diolah, 2023

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* > 0.60 (Latan & Temalagi, 2013).

3.7.3 Struktur Model

3.7.3.1 Uji Koefisien Determinan (Nilai R²)

Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian model untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel laten. Pengujian model dilakukan melalui uji T-Statistic. Nilai R-Square digunakan untuk mengetahui pengaruh substansive variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen lainnya. Nilai R-Square yang tinggi menggambarkan besarnya kemampuan menjelaskan variabel eksogen terhadap variabel endogen. R-Square diklasifikasikan menjadi: 0,67 (kuat), 0,33 (moderat) dan 0,19 (lemah) (Chin, 1998).

Sementara untuk mengetahui tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis digunakan nilai koefisien path atau inner model. Variabel yang signifikan memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel penelitian. *Estimate for Path Coefficients*, merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya konstruk laten. Pada pengujian Inner Model dapat dinilai signifikansi model prediksi dengan melihat nilai probabilitas dan nilai t-statistik. Dengan nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ maka nilai t-tabel adalah 1,64. Maka jika nilai dari T-Statistic $> 1,64$ hipotesis diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut mempunyai arti bahwa baik atau tidaknya akuntabilitas dari sekolah mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, sehingga akuntabilitas yang dilakukan pihak sekolah perlu untuk dijaga dan ditingkatkan.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hal tersebut mempunyai arti bahwa baik atau tidaknya transparansi yang dilakukan oleh sekolah akan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, sehingga transparansi pada sekolah perlu untuk dijaga dan ditingkatkan.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi orang tua tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut mempunyai arti bahwa besar kecilnya

partisipasi orang tua tidak mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pengelolaan dana BOS.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini sehingga mempengaruhi hasil akhir penelitian adalah:

1. Responden kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf kurikulum, staf humas, staf sarana dan prasarana, staf kesiswaan, bendahara, kepala tata usaha, komite sekolah dan wali murid/guru. Wali murid belum banyak mengetahui tentang pengelolaan dana BOS. Hal ini berpengaruh pada keseriusan wali murid untuk mengisi kuesioner karena kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana BOS.
2. Peneliti menyebarkan kuesioner penelitian ini melalui *Miscrosoft Form*. Hal ini menyebabkan beberapa kepala sekolah dimungkinkan mengkondisikan para guru untuk dapat mengisi kuesioner sesuai dengan keinginan kepala sekolah. Hal ini bias dilihat dari jawaban yang hampir sama dalam satu sekolah, sehingga tidak diperoleh data yang real sesuai dengan fakta.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan menggunakan variabel potensial lainnya yang diduga mempengaruhi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti tingkat

pengawasan, pendidikan kepala sekolah, tingkat fasilitas, kualitas sekolah, dan lainnya untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat mempengaruhi pengelolaan dana BOS.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode selain kuesioner untuk memperoleh data penelitian, misalnya wawancara, penggunaan data sekunder, dan lainnya sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih baik.

5.4 Implikasi

1. Berdasarkan hasil penelitian, Verifikasi yang cermat dan integritas yang tinggi dalam penggunaan Dana BOS dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan dana BOS. Hal ini akan membantu memastikan bahwa dana BOS yang digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk meningkatkan pendidikan di sekolah;
2. Dengan membuat perencanaan yang baik yang sesuai dengan RKS/RKAS, sekolah dapat memastikan bahwa penggunaan dana BOS terarah dengan baik dan sesuai dengan prioritas pendidikan. Dengan demikian, dana BOS dapat digunakan secara efektif untuk tujuan meningkatkan hasil belajar siswa;
3. Adanya auditor internal yang independen dapat membantu menjaga integritas dalam pengelolaan dana BOS. Auditor bekerja untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar dan sesuai peraturan sehingga risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan, dan hal ini akan memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang terlibat;

4. Pemerintah menjadikannya sebagai syarat pencairan dana BOS. Dengan harus menyediakan aplikasi pencatatan, pengolahan dan pelaporan data keuangan penggunaan dana BOS yang terintegrasi secara online untuk mengatasi keterlambatan penyampaian laporan penggunaan dana BOS dalam pengelolaan dana BOS:
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memastikan semua penggunaan dana BOS oleh sekolah telah dimasukkan dalam RKAS sebelum dilakukan pengesahan RKAS.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hidayatullah., dan S, Sulhani. (2018). *Pengaruh Manipulasi Laporan Keuangan dan Karakteristik Chief Financial Officer terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 5(2): 117-136.
- Afdalia, N., Pontoh, G. T., & Kartini. 2017. *Theory of Planned Behavior dan Readiness for Change dalam Memprediksi niat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. JAAI, 18(2), 110–123.
- Aja.N, Sunday; Nwafukwa, Peter. 2015. “*Financial Management Skills Required Of Principals For The Implementation Of The Universal Basic Education Programme In Junior Secondary Schools In Ebonyi State Of Nigeria*”. International Journal of Education, Learning and Development, Vol.3, No.5, pp.31-37.
- Akbar, A. (2019). *Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis*, 182–191
- Aldona, N, N., dan Trisnawati, R. 2018. *Pengaruh Tenur Audit, Ukuran KAP, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)*. Prosiding The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alkafi, Ali Mahrus. 2012.” *Pengaruh Sim Menggunakan Aplikasi Software SDS Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bos SMP di Kota Magelang*”. Journal of Economic Education
- Ambrose, Jagongo ; Nyaga, Njagi Gilbert. 2013.”*Capital Budgeting Procedures and Practices in Public Secondary Schools in Kenya [The Case Study of Meru North District]*”. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 21.

- Ammar, Faisyal, dan Bustamam. 2019. *Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Smp Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4(1): 116-130.
- Anggraini, M. 2015. *Pengaruh Partisipasi (Ta'awun), Transparansi (Balagha) dan Akuntabilitas (Mas'uliyah) Dana BOS SD Negeri Di Desa Gajah Mati Terhadap Kinerja (Amaliah) Sekolah*.
- Anggraini, R, D. 2013. *Tansparansi, Partisipasi, dan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 24 (hlm.201-208).
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta., 2008. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Artana, Made ; Hari, Iyus Akhmad ; Bhawa, Gede Andreyan Semara. 2014. *"Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada"*. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 1.
- Asben, Y. (2010). *Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Serta Pengaruh Dana BOS Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Tanah Datar*.
- Asmani, J. M. (2012). *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press. Asmani, J. M. (2012). *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas (4th ed.)*. Pustaka Pelajar
- Baedhowi. 2010. *Revitalisasi Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No. 2.
- Baharuddin ; Alwi ; Nur, Suratman; Ramba, Harmin. 2015. *"Budget Management Performance Based On The Department Of Education Regional Konawe"*. International Journal of cientific & Technology Research, Vol.4, Issue.03

- Bappenas. 2003. *Pelayanan publik di Era Desentralisasi*. Deputi Bidang Polhamkan Bappenas
- C. Lunenburg, Fred. 2010. “*Systems of Budget Administration*”. Focus On Colleges, Universities and Schools. Vol 4, Num 1.
- Chin, W., W. (1998). *The partial least squares approach for structural equation modeling*. In George A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods for Business Research*, Lawrence Erlbaum Associates.
- Danstanwanyonyikukubo; Walela, K, B; Kahavizakiriza, R. 2015. ”*Financial Management In Public Secondary Schools In Kenya: A Case Study Of Lurambi SubCounty Kakamega County*”. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 4, Issue 9.
- Davis, J. H. 1997. *Toward a Stewardship Theory of Management*. *Academy Management Review*, 22: 20-47.
- Dewi. A. W., 2010, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan dan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dharma, S. 2010. *Manajemen Kinerja*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Donleavy, G. (2018). *An Introduction to Accounting Theory* (2nd ed.)
- Ekowati, S. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP NEGERI 03 Kota Tangerang Selatan)*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Fauzan. 2020. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.
- Fauzan, U. 2014. *Analisis Wacana Kritis dari Model Faiclough Hingga Mills*. Jurnal. Samarinda: STAIN
- Feng, Zhao Jun; Memba, Albert Zephaniah. 2016. ”*Significance of Trends on Enrolment, Budget and Actual Expenditure in the Examination of Higher Education Financing in Tanzania*”. *Journal of Education and Practice*. Vol.7, No.15.

- Frederik, C. C. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kota Manado*.
- Fitri, Afrilliana. 2014. "Pegelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiingin Koto Selatan Kota Bukittinggi". *Jurnal Administrasi Pendidikan. Bahana Manajemen Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2014.
- G. Boyland, Lori. 2012. "The Impacts of Budget Reductions on Indiana's Public Schools". *Journal of Studies in Education*. Macrothink Institute, Vol. 2, No. 3.
- Gani, I., dan Amalia. S. 2015. *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang*. Penerbit Andi.
- Gatere, Agnes ; Wango, Geoffrey. 2016. "Integrity and Financial Accountability in Schools: Role of Principals' of Schools in Kenya". *International Journal of Education and Research*.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. 7th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Goodluck, Ifijeh. 2011. "Budgeting for Knowledge Management in Organizations". *Chinese Librarianship: an International Electronic Journal*, 32
- H.A.R Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Surayajaya Press.
- Homayoun, S., & Homayoun, S. (2015). *Agency Theory and Corporate Governance*. *International Business Management*, 9(5), 805–815.
- Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ismail, Y. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Partisipasi*

Orang Tua Siswa SMA N 1 Luwu Utara. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. Journal of Finance Economic 3:305360

Kaswandi. (2015). *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan*.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*.

Kemendikbud. L.J. Moloeng, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Karya.

Kerlinger. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behaviour*. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Latan, H. dan Temalagi, S. 2013. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20,0*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Manullang .2002. *Dasar-dasar Manajemen*.Yogjakarta. Gadjah Mada University Press Marzuki. 2004. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. BPFPE – UII.

Miles, Matthew B. dan A Michael Humberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*.

Mulyasa. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muryati, I. (2016). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan.Yogyakarta.

Namazi, M., & Ebrahimi, F. (2017). *A study of accountants' whistle-blowing intention: Evidence from Iran*. International Journal of Business Governance and Ethics, 12(4), 349–373.

- Nurcholidah, S. dan Petrus, P. 2009. *Pengaruh jenis pengencer terhadap motilitas dan daya tahan hidup spermatozoa semen cair sapi Simmental*. Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran. Bandung.
- Noviyanti, R. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Bukit Raya Serawai Kabupaten Sintang Kalimantan Timur*. Sanata Dharma University Yogyakarta.
- Pang, I.-W. (2008). *School-based management in Hong Kong: centralizing or decentralizing*. *Education Res Policy Practice*, 7, 17-33.
- Pasoloran, O. dan Rahman, F, A. 2001. *Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3 (2).
- Pepper, A., & Gore, J. (2014). *Behavioral agency theory: new foundations for theorizing about executive compensation*, (March).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2001, Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos Tahun 2012.
- Polidano, C. (1999). *The new public management in developing countries*. *IDPM Public Policy and Management*, 13(November), 1-38.
- Rakhmawati, Ita. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Partisipasi Stakeholder sebagai Variabel Moderasi*. Volume 1 No. 1.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Sekaran, dan Bougie. 2013. *Research methods for business: a skill-building approach – 6th ed*. West Sussex, UK : John Wiley & Sons Ltd.
- Silele, E. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 1626–1635.
- Solihat dan Sugiharto (2009). “*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orangtua Murid di SMA*”

- Negeri 107 Jakarta.*” Jurnal Ekonomi Bisnis No.2 Vol.14 hal: 135143/diakses 22 November 2018.
- Suharyo, W. I., & Widyanti, W. (2006). *Kajian Cepat: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Akses Terhadap Pendidikan Dasar bagi Masyarakat Miskin.*
- Sukardi, A. (2009). *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: LaksBang, Pressindo.
- Sukrisno. A., Ardana. I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya.* Jakarta : Salemba Empat.
- Supriono, & Sapari, A. (2001). *Manajemen Berbasis Sekolah. Jatim: SIC kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF-UNESCO.*
- Susanti, H. (2019). *Penerapan Good School Governance (GSG) dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar.* Jurnal Revitalisasi, 8(5), 55.
- Trisnawati, F. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah di Kota Pekanbaru.* Jurnal Al-Iqtishad, 10.
- Turner, B. S. (2012). *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 Bab XIII, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang - Undang Tahun 2002, Tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah.
- Vernez, G., Karam, R., & Marshall, J. H. (2012). *Implementation of School-Based Management in Indonesia.* Santa Monica: RAND Corporation.
- Victoria, T. 2014. *Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan.* (Online), (<http://eprints.uny.ac.id/>, diakses 27 November 2017).
- Wahyudi, I. (2006). *Metodologi Perencanaan Partisipatif: Best Practice untuk Musrenbang.* Jakarta: Malang Corruption Watch dan Yappika.

- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Wampler, B. (2012). *Participatory Budgeting: Core Principles and Key Impacts*. *Journal of Public Deliberation*, 8(2), 1-13.
- Wong, K. K.-K. (2019). *Mastering Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS in 38 Hours*. *iUniverse*.
- Yanti, N. L. T. (2021). *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS Di SMP N 3 Sukawati Dalam Program RKAS*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 139–151.
- Yusra, M., Yunita, N. A., Nurhasanah, & Arliansyah. 2021. *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi*. *Visioner Dan Strategis*, 10, 79–86
- Yusuf, A, M. 2005. *Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah)*. Padang: UNP Press.